

**PRAKTEK BAGI HASIL AREN
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**“Studi Kasus di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten
Mandailing Natal.”**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)**



SAPARUDDIN

NIM:10625003904

PROGRAM SI

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
R I A U
2011**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: “**PRAKTEK BAGI HASIL AREN DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI KABUPATENMANDAILING NATAL)**”.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana sistem bagi hasil aren di kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, dan bagaimana sistem bagi hasil aren tersebut di tinjau dengan ekonomi Islam. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data *primer* dan data *sekunder* dengan metode pengumpulan data *observasi*, dan *wawancara*. Setelah data tersebut terkumpul penulis melakukan analisis data dengan menggunakan *analisis, Kualitatif*.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah petani kebun aren yang berjumlah 15 orang, sedangkan pekerja kebun aren sebanyak 60 oarang. Karena jumlah populasi terjangkau maka penelitian ini tidak menggunakan (riset populasi). Setelah penulis melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan di Kecamatan Puncak sorik Marapi menggunakan 5 sistem bagi hasil yaitu: (1) sistem sewa (2) sistem bagi dua (3) sistem bagian batang (4) sistem tolong menolong (5) sistem bagi tiga. Dan pada hakikatnya bagi hasil yang diterapkan di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, setelah penulis melakukan penelitian maka dapat menyimpulkan bahwa sistem Bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, kecuali dalam sistem bagian batang harus dilihat dulu akad dan tujuan pemotongannya.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan	8
 BAB II GAMBARAN UMUM	
A. Keadaan Geografis	10
B. Keadaan Demografi	11
C. Keadaan Sosial Budaya.....	14
1. Lembaga Pemerintah	14
2. Keagamaan	15
3. Pendidikan	15
4. Mata Pencaharian	17

BAB III	TINJAUAN UMUM BAGI HASIL PERTANIAN DALAM EKONOMI ISLAM	
A.	Pengertian Ekonomi Islam	21
B.	Prinsip-prinsip dan Sumber-sumber Ekonomi Islam	25
C.	Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam	32
D.	Bagi Hasil Pertanian dalam Ekonomi Islam	42
BAB IV	PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK BAGI HASIL AREN DI KECAMATAN PUNCAK SORIKMARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL	
A.	Sistem bagi hasil aren di Kecamatan Puncak Sorik Marapi	46
B.	Sistem bagi hasil aren di Kecamatan Puncak Sorik Marapi di tinjau menurut Ekonomi Islam.....	53
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	61
B.	Saran.....	62
	DAFTAR PUSTAKA.....	63
	LAMPIRAN.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT masing-masing bermaksud/berhajat kepada yang lain, supaya mereka saling kasih mengasihi atau tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam jual beli, bercocok tanam, sewa menyewa dan hal lainnya. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur serta terjalinnya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi sifat tamak dan rakusnya manusia serta mementingkan diri sendiri terkadang masih melekat pada manusia itu sendiri, supaya hak masing-masing jangan disia-siakan dan demi kemaslahatan, maka agama memberikan aturan yang sebaik-baiknya sebagaimana yang telah di atur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, karena dengan teraturnya mu'amalah, kehidupan manusia menjadi terjamin dengan sebaik-baiknya, pemfitnahan dan dendam tidak akan terjadi.¹

Sesuai dengan aktifitas seorang muslim, maka hubungan yang bersifat mu'amalah tidak terlepas sama sekali dengan masalah-masalah ketuhanan karena apapun aktivitasnya di dunia ini senantiasa dalam pengabdian kepada Allah SWT.

¹ Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam* (Bandung : CV Sinar Baru 1998) h.262

Islam menganjurkan ummatnya untuk dapat mengelola atau memproduksi dan dapat berperan dalam kegiatan ekonomi, perkebunan, perikanan dan bentuk produksi lainnya. Islam sangat meridhai pekerjaan dunia dan menjadikannya sebagai ibadah.

Ekonomi Islam sangat menuntun agar terlaksananya aktivitas produksi dan mengembangkannya, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Ekonomi Islam tidak rela komiditi dan tenaga manusia terlantar begitu saja. Islam menghendaki semua tenaga dikerahkan semaksimal mungkin untuk berproduksi, supaya semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi.

Timbul permasalahan di bidang ekonomi oleh individu, masyarakat maupun Negara semuanya disebabkan oleh kelangkaan (*scarcity*) sumber daya manusia (*human resources*) yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Manusia mempunyai keinginan yang relatif tidak terbatas, sementara alat pemenuhannya terbatas, untuk itu dalam menghadapi perekonomian seperti ini manusia hendaknya membuat target/skala prioritas dan pilihan-pilihan yang tentunya sesuai dengan keterampilan dan sumber daya alamnya.²

Untuk bangsa Indonesia sendiri pertanian sudah menjadi pilihan utama masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhannya, ini biasa dilihat dari mayoritas masyarakat yang menguntungkan ekonomi keluarganya pada sektor pertanian. Dari sekian banyak masyarakat yang menyandarkan kehidupan

² Sadono Sukimin , *Pengantar Teori Ekonomi Makro* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada) h. 5

keluarganya pada sektor perkebunan adalah salah satunya pada perkebunan aren merupakan partner usaha, bukan sebagai yang meminjamkan modal. Hal ini terwujud dalam bentuk kerjasama antara pemilik dengan pihak yang kedua dalam melakukan unit-unit usaha atau kegiatan ekonomi dengan landasan saling membutuhkan.

Di Kecamatan Puncak Sorik Marapi penduduknya mayoritas petani, aren adalah salah satu ujung tombak untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder mereka. Hanya saja tidak semua penduduk disini mempunyai lahan ataupun kebun aren. Sehingga mereka harus bekerjasama dengan orang yang memiliki lahan atau kebun aren yang cukup luas. Dari kegiatan ekonomi kedua belah pihak ini hasilnya nanti akan dibagi sesuai dengan mekanisme pengelolaan dan kesepakatan mereka, yang mana pembagian itu seperti sistem bagi dua, dan sistem bagi tiga.

Sesuai dengan hasil wawancara bahwa dalam bagi hasil pada aren sudah memenuhi dari kesepakatan antara pemilik kebun dan pengelola kebun, misalnya Darwis selaku pemilik kebun aren, menurutnya (Darwis) setiap pembagian hasil aren, selalu mendapat bagian dari kesepakatan yang mereka janjikan sebelumnya tanpa dkurangi atau dilebihkan dari Syukri sebagai pengelola kebun aren.³

³ Darwis (Sibanggor Julu), 20 Oktober 2010

Begitu juga yang dirasakan oleh Amran selaku pengelola kebun Rudin, menurutnya (Rudin) setiap pembagian hasil, selalu sesuai dengan kesepakatan yang mereka janjikan sebelumnya, karena semua hasil penjualan aren terlebih dahulu diberikan ke Rudin sebagai pemilik kebun, lalu dibagi dari hasil penjualan sesuai dengan kesepakatan⁴.

Dan Allah tidak akan menetapkan segala bentuk akad, melainkan untuk terciptanya kemaslahatan serta terbedungnya kemiskinan. Untuk itu, berdasarkan fenomena di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan ini dalam suatu penelitian yang berjudul : **“PRAKTEK BAGI HASIL AREN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM” (Studi Kasus di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal)**

B. Batasan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, agar jangan sampai terjadi pembahasan yang tidak terarah, maka penulis membatasi masalah ini mengenai praktek bagi hasil aren dalam Perspektif Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang melatarbelakangi kondisi masyarakat Kecamatan Puncak Sorik Marapi di atas, khususnya praktek bagi hasil di

⁴ Rudin (Sibanggor Tonga), 20 Oktober Maret 2010

bidang perkebunan aren, dalam penulisan ini penulis membatasi kajian rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem bagi hasil aren di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana sistem bagi hasil aren tersebut di tinjau menurut pandangan Ekonomi Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil aren di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal
2. Untuk mengetahui Bagaimana Relevansi sistim bagi hasil aren dalam pandangan Ekonomi Islam.

Adapun manfaatnya adalah :

1. Menambah khasanah pengetahuan di bidang ekonomi Islam khususnya dalam bagi hasil pertanian
2. Semoga dapat menjadi kajian dan informasi bagi masyarakat di Mandailing Natal dalam memperkaya ekonomi kerakyatan terutama di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal.
3. Supaya dapat menjadi salah satu rujukan/referensi untuk penelitian serupa dalam lingkungan yang lebih luas.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, dengan alasan:

- ❖ Mudah dijangkau, secara teori masyarakat Puncak Sorik Marapi sudah mengetahui dari kelima sistem bagi hasil di atas, akan tetapi mereka belum atau kurang mengetahui apakah sudah sesuai menurut tinjauan ekonomi Islam.
- ❖ Untuk mengetahui sistem bagi hasil aren di Kecamatan Puncak Sorik Marapi dan untuk mengetahui sistem bagi hasil aren tersebut menurut tinjauan ekonomi Islam.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemilik dan pekerja kebun Aren. Sedangkan objeknya adalah praktek bagi hasil aren dalam perspektif ekonomi Islam.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah petani kebun aren yang berjumlah 15 orang, sedangkan pekerja kebun aren sebanyak 60 orang. Karena jumlah populasi terjangkau maka penelitian ini tidak menggunakan (Riset populasi)

4. Sumber data

a. Data Primer

Yaitu data yang di peroleh langsung dari responden yaitu pengelola dan pemilik kebun aren di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan peninjauan langsung ke lapangan/lokasi desa yang menjadi objek penelitian terutama mengenai sistim bagi hasil aren
- b. Wawancara yaitu penulis melakukan tanya jawab langsung kepada pengelola aren, pemilik kebun aren, dan tokoh masyarakat, kepala desa tempat penulis meneliti.

6. Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan berhasil dikumpulkan, selanjutnya penulis menganalisa data tersebut dengan mengumpulkan data primer dan sekunder yang di peroleh dari lapangan kemudian diolah dengan cara mengelompokkan dan memilah data berdasarkan jenis data,

selanjutnya data tersebut berbentuk kualitatif yaitu data yang di sajikan atau diterangkan dengan kalimat yang jelas dan terperinci kemudian data tersebut di analisa dengan teori perundang-undangan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan bagi pembaca dalam menganalisa dan memenuhi hasil penulisan ini maka dibuatlah satu sistem penulisan yang dibagi atas beberapa bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari : Latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Kecamatan Puncak Sorik Marapi

Dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum Kecamatan Puncak Sorik Marapi, terdiri dari: keadaan geografis, keadaan demografi, mata pencaharian.

BAB III : Tinjauan Umum Bagi Hasil Pertanian dalam Ekonomi Islam

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian ekonomi Islam, prinsip-prinsip dan sumber-sumber ekonomi Islam, bagi hasil dalam ekonomi Islam dan bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam.

**BAB IV : Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Aren Di
Kecamatan Puncak Sorik Marapi**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai sistem bagi hasil aren di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, dan sistem bagi hasil aren di tinjau menurut ekonomi Islam.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Dalam bab terakhir ini berisikan tentang penarikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI

A. Keadaan Geografis

Kecamatan Puncak Sorik Marapi merupakan salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Mandailing natal. Untuk lebih jelasnya lokasi penelitian ini maka penulis akan menerangkan batas-batas wilayah Kecamatan puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Panyabungan Selatan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batang Natal
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambangan
- Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Lembah Sorik marapi

Kecamatan Puncak Sorik Marapi ini mempunyai luas 6.680 Ha, terdiri dari 2.175 Ha lahan pertanian dan 4.505 Ha pemukiman penduduk, terdiri dari sebelas desa yaitu desa Huta Raja, Purba Julu, Sibanggor Jae, Sibanggor Tonga, Sibanggor Julu, Huta Lombang, Kampung Baru, Huta Namale, Huta tinggi, Kampung Lamo, Huta Baringin. Jarak tempuh ke Kecamatan yaitu 10 Km, sedangkan jarak ke Kabupaten adalah 30 Km yang biasa di tempuh dalam jarak waktu 45 menit dengan menggunakan kendaraan umum.

B. Keadaan Demografi

Kecamatan Puncak Sorik Marapi terdiri dari 11 desa yaitu:

1. Desa Huata Lombang
2. Desa Huta Baru
3. DesaHandel
4. Desa Huta Tinggi
5. Desa Hutanamale
6. Desa Hutabaringin
7. Desa Huta Julu
8. Desa Sibanggor Jae
9. Desa Sibanggor Tonga
- 10.Desa Kampung Lama
- 11.Desa Sibanggor Julu

Keadaan bangunan di Kecamatan Puncak Sorik Marapi tersusun sesuai dengan keadaan daratannya yang sebagian besar terletak mengikuti pinggiran jalan raya lintas Kecamatan. Kemudian dalam segi penerangannya, keadaan Kecamatan punacak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal sebagian besar sudah dialiri listrik dari PLN, namun ada juga yang belum di aliri oleh aliran listrik, contohnya desa Hutabaringin yang pada malam harinya terlihat gelap dan sunyi, mereka menggunakan lampu colok sebagai alat penerangnya, bagi mereka yang mampu maka mereka dapat menggunakan disel atau genset sebagai penerangnya.

Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2009/2010, penduduk kecamatan Puncak Sorik Marapi berjumlah 8.515 orang atau 367 kepala keluarga(KK). Penduduk Kecamatan puncak Sorik Marapi merupakan masyarakat majemuk, hal ini dapat dilihat hampir di seluruh aspek, baik dari segi umur, tingkat pendidikan dan mata pencaharian. Hal ini seperti tertera pada tabel-tabel berikut:

Table II. 1
Jumlah Penduduk Kecamatan Puncak Sorik Marapi
Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2009/2010

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	4.072
2	Perempuan	4.443
	Jumlah	8.515

Sumber: Data dari Kantor Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal 2009.

Mayoritas penduduk di Kecamatan Puncak Sorik Marapi berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 4443 jiwa, yang berarti jumlah penduduk seluruhnya 8.515 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan usia (umur)dapat dilihat pada tabel berikut:

Table II. 2
Jumlah Penduduk Menurut Ketentuan Usia

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4 Tahun	405	415	820
2	5-9 Tahun	504	485	989
3	10-14 Tahun	544	550	1094
4	15-19 Tahun	785	524	1029
5	20-24 Tahun	340	319	649
6	25-29 Tahun	306	314	620
7	30-34 Tahun	234	205	519
8	35-39 Tahun	216	263	479
9	40-44 Tahun	204	200	404
10	45-49 Tahun	177	238	412
11	50-54 Tahun	194	207	422
12	55-59 Tahun	194	198	401
13	60-64 Tahun	138	265	544
14	65 Keatas	4072	4443	405

Sumber: Data dari Kantor Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tahun 2009

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Puncak sorik Marapi adalah pemuda dan pemudi yang berusia berkisar antara 0-4 tahun yang berjumlah 820 orang, kemudian diikuti umur 5-9 tahun sebanyak 989 orang, di susul umur 10-14 tahun yang berjumlah 1044, selanjutnya umur 15-19 tahun berjumlah 1014 orang, umur 20-24 tahun berjumlah 644 orang, dilanjutkan dengan umur 25-29 yang berjumlah 620 orang,

dan urutan yang paling rendah atau yang paling sedikit adalah umur 55-59 tahun yang berjumlah 401 orang dari jumlah penduduk.

C. Keadaan Sosial Budaya

1. Perlembagaan Pemerintah

Kecamatan Puncak Sorik Marapi kabupaten Mandailing Natal dipimpin oleh seorang Kepala Camat yang dibentuk oleh perangkat pemerintah, yang terdiri dari 11 desa, yang setiap desanya dipimpin oleh satu kepala desa, semuanya bekerja sesuai dengan batas wilayah kerja yang telah ditentukan.

Dalam melaksanakan pemantauan Kecamatan dan sebagai kontrol terhadap pelaksanaan tugas Camat, maka pemerintah daerah (PEMDA) Mandailing Natal membentuk suatu lembaga. Adapun personalia Kecamatan Puncak Sorik Marapi kabupaten Mandailing Natal dapat di lihat pada berikut:

Table II. 3
Personalia Kecamatan Puncak Sorik Marapi
Kabupaten Mandailing Natal

No	Nama	Jabatan
1	Yahya SE	Camat
2	Drs. Lukman	Sekretaris
3	Drs. Makmun	Kasubbag Program Evaluasi
4	Zulfikar. S.sos	Kasubbag Umum Pegawaian
5	Harnenajah. S.Ag	Kasubbag Keuangan
6	Elwin Hamonangan. S.sos	Seksi Pemerintahan
7	Sahlan Rangkuti	Seksi Ketenteraman
8	Idris	Seksi Kesejahteraan Sosial
9	Damrawati. Spd	Seksi Pelayanan
10	Miswaruddin. Spd	Seksi Pemberdayaan Desa

2. Keagamaan

Agama merupakan suatu pegangan yang harus dijadikan satu landasan bagi seorang muslim. Agama merupakan suatu kekuatan yang diperkaya dan digunakan untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam kehidupan beragama, masyarakat Kecamatan Puncak sorik Marapi hidup dengan rukun dan penuh kedamaian, karena perbedaan di antara manusia tidaklah berarti, bahkan dengan perbedaan itu manusia akan menjadi sempurna, karena akan saling mengisi antara satu dengan yang lainnya.

Penduduk Kecamatan Puncak Sorik Marapi 100% beragama Islam. Kepala Camat Puncak sorik Marapi mengatakan dalam wawancaranya dengan penulis,” sesuai dengan data sensus penduduk tahun 2009/2010, penduduk Kecamatan Puncak Sorik Marapi ini beragama Islam.⁸

Sebagaimana tersebut di atas bahwa masyarakat di Kecamatan Puncak Sorik Marapi ini adalah beragama Islam, maka dengan sendirinya lembaga keagamaan yang terdapat di Kecamatan Puncak Sorik Marapi hanyalah lembaga keagamaan Islam saja.

3. Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan dalam suatu proses pembangunan dan perkembangan desa. Karena dengan kualitas sumber daya manusia yang bagus dan cakap maka sangat menentukan

⁸ Yahya (Camat Puncak Sorik Marapi), 11 April 2009

pembangunan dan perkembangan dari suatu daerah tersebut kearah yang paling cemerlang/baik.

Teriring dengan kemajuan zaman, maka timbul kesadaran dan kepedulian masyarakat yang cukup tinggi bagi dunia pendidikan. Karena dengan pendidikan akan dapat mengubah taraf hidup mereka dari keterbelakangan menjadi maju di segala bidang. Kepedulian masyarakat diwujudkan dengan adanya lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, serta usaha untuk memberikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pendidikan formal itu seperti Sekolah Dasar (SD) sampai kepada pendidikan tingkat sarjana. Sedangkan pendidikan non formal, masyarakat di Kecamatan Puncak Sorik Marapi di arahkan kepada pendidikan agama seperti Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA).

Di Kecamatan Puncak Sorik Marapi terdapat beberapa sarana dan pra sarana untuk meningkatkan sumber daya manusia seperti pada tabel berikut:

Table II. 4
Sarana dan Pra Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	6
2	Sekolah Dasar	11
3	Sekolah Menengah Pertama	7
4	Madrasah Aliyah	4
	Jumlah	28

6. Mata Pencaharian

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal mempunyai berbagai usaha, hal ini sesuai dengan profesi dan keahliannya masing-masing.

Menurut Yahya, bagi masyarakat Kecamatan Puncak Sorik Marapi ini mata pencaharian mereka bermacam-macam seperti, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Guru (Tenaga Pengajar), Bertani dan Kuli bangunan.

Namun tidak jarang di antara mereka yang berdagang dan menjadi tukang dan buruh bangunan. Hal ini terpenting bagi mereka adalah pekerjaan itu halal dan dapat menghidupi keluarga⁹. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel V sebagai berikut ini:

Tabel II. 5

Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Puncak Sorik Marapi.

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	5.500
2	Pedagang	645
3	Pertukangan	315
4	Guru	255
5	Pegawai Negeri Sipil	150
	Jumlah	6.865

Dari table di atas dapat di ketahui bahwa mayoritas mata pencaharian masyarakat Kecamatan Puncak Sorik Marapi adalah bertani yaitu sebanyak 5500

⁹ Yahya (Camat Puncak Sorik Marapi), 13 April 2010

orang Kemudian di ikuti dengan 255 orang, selanjutnya pegawai negeri sipil 150 orang, selanjutnya pertukangan 315rang, dan pedagang sebanyak 645 orang.

7. Adat Istiadat

Adat istiadat tumbuh dari kebiasaan masyarakat yang menjadi tingkah laku sehari-hari dalam hidup dan kehidupan serta pergaulan.

Asas dari adat istiadat memelihara keseimbangan dalam hubungan kerukunan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya. Peranan adat istiadat dahulu sampai sekarang, masih tetap terpelihara dalam mengatur kehidupan masyarakat. Tentunya dengan tidak mengurangi bahwa masyarakat masih tetap menjalankan syari'at agama Islam. Jadi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta syari'at agama Islam, adat istiadat tetaplah sangat diperlukan.

Pada dasarnya adat istiadat yang terdapat di Kecamatan Puncak Sorik Marapi tidak jauh beda dengan adat istiadat pada daerah-daerah lainnya. Adapun adat istiadat itu antara lain¹⁰.

a. Pernikahan

Sebelum melaksanakan pernikahan, terlebih dahulu masyarakat harus melalui langkah-langkah awal, seperti berkumpulnya kedua belah pihak keluarga, baik laki-laki maupun perempuan hal ini di lakukan dalam rangka proses pengenalan, baik untuk kedua calon maupun antara keluarga yang satu dengan yang lainnya.

¹⁰ Yahya (Camat Puncak Sorik Marapi), 13 April 2010

Hal ini dilakukan oleh keluarga yang bersangkutan dan merupakan salah satu cara mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap proses pelamaran dan *'alimatul urusanya*

b. Khatam Qur'an

Khatam Qur'an ini biasanya dilakukan dalam acara Khitanan. Disamping itu berbagai acara yang bernapaskan Islam yang diselenggarakan pada saat atau bulan tertentu. Seperti, Israk mikraj, Maulud Nabi, Nuzul Qur'an. Demi untuk meningkatkan syiar-syiar Islam. Hal ini bertujuan untuk mengingat bahwa mereka biasa membaca Al-Qur'an.

c. Kenduri

Kenduri biasanya dilakukan dengan acara pembacaan surat yasin, *tahlil*, *dan tasbih* dan do'a bersama. Hal ini dilakukan pada acara kenduri karena ada kematian(*ta'ziyah*), juga pada acara hajatan baik itu syukuran, nazar maupun aqiqah. Dengan tujuan diadakan ini supaya segala do'a dan permohonan dapat dikabulkan Allah SWT.

BAB III

TINJAUAN UMUM BAGI HASIL PERTANIAN DALAM EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Ekonomi Islam

Dalam pemikiran ekonomi barat menterjemahkan ekonomi sebagai pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara perseorangan, kelompok dalam mengetahui kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber yang terbatas.

Secara etomologi kata ekonomi diambil dari bahasa Yunani kuno yaitu *oikonomia*, *oikos* berarti rumah dan *nomos* berarti tangga, karena itu ekonomi diterjemahkan sebagai ilmu yang mengatur rumah tangga.¹³

Sedangkan menurut Paul A. Samuel, salah seorang ahli ekonomi terkemuka memberikan definisi, ilmu ekonomi merupakan studi tentang individu dan masyarakat dalam pilihan, dengan atau tanpa menggunakan uang, dengan sumber-sumber terbatas, tetapi dapat di gunakan dalam berbagai cara untuk kepentingan konsumen sekarang dan di masa yang akan datang, individu dan golongan masyarakat.¹⁴

Dari pengertian tentang ekonomi yang dikemukakan oleh para pemikir barat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ekonomi adalah kegiatan yang di dalam pelaksanaannya hanya berlaku hukum positif saja, bahwa kegiatan

¹³ Samuelson, *Ilmu Makro Ekonomi*, (Jakarta: Media Global Edukasi, 2004), h.3

¹⁴ Sodono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Wali Pers), h.10

ekonomi harus berjalan sesuai apa adanya tanpa harus memikirkan akibat yang akan di timbulkan dari kegiatan ekonomi tersebut. Bagi mereka bahwa hukum normative tidak biasa di gabungkan dalam kegiatan ekonomi, karena tidak terdapat di dalamnya nilai-nilai islam.¹⁵

Islam menganjurkan penganutnya agar dapat berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan-aturan tersebut di antaranya, carilah yang halal lagi baik; tidak menggunakan cara bhatil; tidak berlebihan/ melampaui batas; tidak di zalimi dan tidak menzalimi; menjauhkan diri dari unsur-unsur riba, *maisir* (perjudian) dan *gharar*(ketidakjelasan dan manipulatif), serta tidak melupakan tanggung jawab social berupa zakat, infak, dan sedekah. Islam juga mendorong ummatnya/ pemeluknya untuk bekerja, hal tersebut disertai jaminan dari Allah SWT bahwa ia menetapkan rezeki setiap makhluk yang di ciptakan –Nya. Islam juga melarang ummatnya untuk meminta-minta atau mengemis.¹⁶

Sebagai ekonomi yang ber-Tuhan, maka ekonomi Islam, dengan mengakses kepada aturan-aturan Ilahiah, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Sebagai tindakan manusia tidak lepas dari nilai yang secara vertikal merefleksikan moral yang baik dan secara horizontal memberikan manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya.¹⁷

¹⁵ Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), h.19

¹⁶ Safi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h. 11-12

¹⁷ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) h.12

Menurut Yusuf Qardawi, ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak terlepas dari syari'at Allah SWT. Aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi, impor dan ekspor tidak terlepas dari titik tolak ketuhanan dan bertujuan akhir kepada Tuhan.¹⁹

Ekonomi dalam pandangan Islam bukanlah merupakan tujuan akhir dari kehidupan ini, akan tetapi hanya suatu perlengkapan hidup, sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dan penunjang bagi aqidah dan misi yang diembannya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam tidak semata ilmu ekonomi yang positif. Dalam ekonomi Islam, aspek-aspek yang normative dan positif itu saling berkaitan erat, sehingga setiap upaya untuk memisahkan akan berakibat menyesatkan dan tidak akan produktif.²⁰

Hal ini menjadikan ruang lingkup ekonomi Islam lebih luas dan komprehensif, karena ia tidak hanya bicara tentang motif akan tetapi juga tentang perilaku manusia apa adanya, namun ia juga mempunyai jalan tertentu dimasa yang akan datang dimana perilaku manusia harus diarahkan kepadanya. Pendekatan seperti inilah yang merupakan ciri yang menonjol dari ekonomi Islam.

¹⁹ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) h. 31

²⁰ Mannan, *op.cit.* h.10

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ekonomi Islam adalah studi tentang problem-problem ekonomi dan institusi yang berkaitan dengannya. Atau ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencari ridho Allah. Dalam ekonomi Islam bahwa hukum positif, dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi harus ada nilai-nilai agama yang mengaturnya dan itulah yang menjadikannya perbedaan yang mendasar antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional lainnya.

B. Prinsip-prinsip dan Sumber-sumber Ekonomi Islam

1) Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi Islam melihat bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan bersama atau masyarakat. Antara keduanya harus ada hubungan atau keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, dengan demikian nantinya akan terwujud kesejahteraan yang adil.

Untuk lebih rinci mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Prinsip Tauhid dan Persaudaraan

Tauhid yang secara harfiah berarti satu atau esa, dalam konteks ekonomi menganjurkan seseorang bagaimana berhubungan dengan orang lain dalam hubungannya dengan Tuhannya. Prinsip ini menyatakan bahwa di belakang praktek ekonomi yang didasarkan atas pertukaran, alokasi sumber daya,

kepuasan dan keuntungan, dan ada satu keyakinan yang sangat fundamental, yakni keadilan sosial. Dalam Islam, untuk memahami hal ini berasal dari pemahaman dan pengamalan Al-qur'an. Dengan pola pikir demikian, prinsip tauhid dan persaudaraan terdapat azas kesamaan dan kerjasama. Konsekuensinya terdapat dari prinsip tauhid dan persaudaraan adalah pengertian yang penting dalam ekonomi Islam, yaitu bahwa apapun yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah SWT, dan bahwa dia telah menjadikannya itu sama untuk keperluan manusia dan makhluk lainnya. Manusia telah diciptakan dan diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menggunakan dan mendistribusikannya secara adil sumber daya-Nya di bumi.²¹

b) Prinsip kerja

Prinsip ini menegaskan tentang kerja dan kompensasi dari kerja yang telah dilakukan. Prinsip ini juga menentukan bahwa seseorang harus profesional dengan kategori pekerjaan yang di kerjakan. Yaitu harus ada perhitungan misalnya "jam orang kerja" dan harus pula kategori yang spesifik bagi setiap pekerja atau keahlian. Kemudian upah dari setiap spesifikasi itu harus pula

²¹ Muhammad Asyraf Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), h. 13

didasarkan atas upah minimum dan disesuaikan dengan hukum pemerintahan.²²

c) Prinsip Distribusi dan Kekayaan

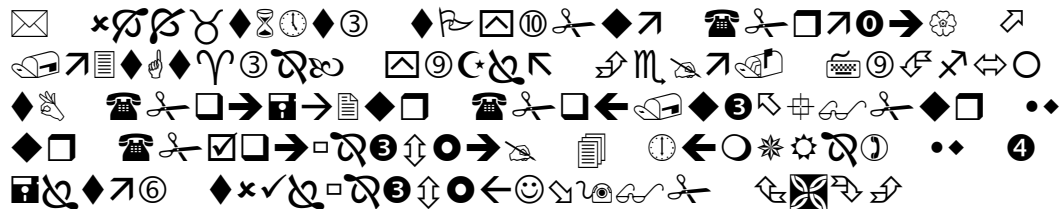
Disini ditegaskan adanya hak masyarakat untuk mendistribusikan kekayaannya yang digunakan untuk tujuan redistribusi dalam sebuah sistem ekonomi Islam adalah zakat, shadaqah, ghamimah. Hukum Islam tentang warisan mendorong untuk mendistribusikan kekayaan seseorang. Jadi retribusi pendapatan dan kekayaan secara merata berlaku terhadap Negara dan dasar ketauhitan dan persaudaraan. Tujuannnya adalah untuk meningkatkan transformasi yang produktif dari pendapatan dan kekayaan nasional menjadi kesempatan kerja untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga Negara.

d) Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang bisa berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan ekonomi Islam misalnya kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan. Konsep keseimbangan ini tidak hanya perbandingan kebaikan hasil usaha yang di arahkan untuk dunia dan akhirat saja, akan tetapi juga berkaitan dengan kepentingan umum yang harus di pelihara

²² *Ibid*, h. 33

dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.²³ Dan Allah SWT juga tidak suka kepada umat-Nya yang berlebihan, hal ini terlampir dalam Al-Qur'an surat al-a'raf ayat 31 yang berbunyi:



Artinya: *Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Qs. Al-a'raf: 31).*²⁴

2) Sumber-sumber Hukum Ekonomi Islam

Sebagaimana telah diuraikan, bahwa sistem ekonomi Islam dalam aktivitasnya sangat menitikberatkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam.

Oleh karena itu setiap pelaku ekonomi, baik individu, masyarakat maupun pemerintah dalam aktivitasnya mengharuskan adanya kepatuhan terhadap peraturan atau norma-norma yang telah di atur Islam, dapat di kemukakan disini beberapa sumber hukum ekonomi Islam yaitu *Al-qur'an, Sunnah dan Ijma'*²⁵.

²³ Syaefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1987) h. 66

²⁴ Departemen Agama, *Op. cit.* h. 225

²⁵ Mannan, *Op.cit.* h.28

a) Al-Qur'an

Al-qur'an adalah sebagai sumber pokok ajaran Islam. Ajaran Islam yang universal mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk didalamnya masalah ekonomi. Indikasi Al-qur'an sendiri adalah" kalam Allah SWT yang di turunkan oleh-Nya dengan perantaraan malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad SWA dengan lafaz bahasa Arab dan dengan makna yang benar, agar menjadi *hujjah* bagi Rasul juga sebagai undang-undang yang di jadikan pedoman umat manusia dan sebagai ibadah bila membacanya.²⁶

Karena itulah dalam ajaran Islam terdapat dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang berkenaan dengan hidup keduniaan, baik ia politik sosial maupun ekonomi. Dalam Islam kedudukan ekonomi sangat penting, karena ekonomi merupakan faktor yang akan membawa seseorang kepada kesejahteraan.

Oleh sebab itu tidak mengherankan jika di dalam Al-qur'an terdapat banyak sekali ayat-ayat yang berkenaan dengan persoalan ekonomi.

Firman Allah SWT;

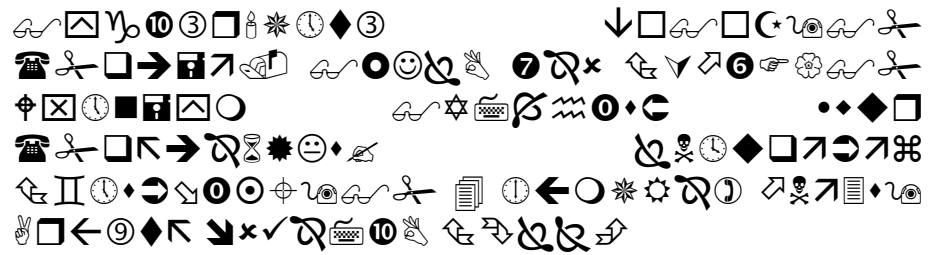


Artinya: *Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Al-Baqarah: 275).*²⁷

Dalam ayat lain Allah SWT juga menjelaskan;

²⁶ Abdul Wahab Khalallaf, *Ilmu ushul Fiqh* (terjemahan), Masdar Helmi dari judul asli" *Ilmu Ushul Fiqhi*, (Bandung: Gema Insani Press, 1997) h. 17

²⁷ Departemen Agama, *Op.cit*, h. 275



Artinya: *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.* (QS.Al-Baqarah:168).²⁸

b) As-Sunnah

Menurut istilah syara' assunnah ialah suatu yang datang dari Rasulullah SAW baik berupa ucapan, perbuatan atau *taqrir* (persetujuan)", *assunnah qauliyah* (sunnah ucapan) ialah hadits-hadits Rasulullah SAW yang berupa ucapan di dalam berbagai tujuan dan permasalahan.²⁹

Salah satu bukti kehujjahan assunnah atau hadits adalah:

آن راسو الله صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة كان له اجرها واجر من عمل بها بعده لا ينض ذلك من اجورهم شيئا, ومن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينض ذلك من اوزرهم شيئا (رواه مسلم وابن ما جه والدارمي).

²⁸ Departemen Agama, *Op.cit.* h.41

²⁹ Abdul Wahab Khallaf. *Op.cit.* h. 37

“Bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahala-Nya dan juga pahala-Nya orang yang mengamalkannya sesudahnya; tidak mengurangi yang demikian itu akan pahalanya maka sedikitpun. Dan siapa yang merintis jalan yang lurus, ia akan menerima dosanya, dan juga dosa orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi dosanya sedikitpun” (HR. Muslim, Ibnu Majah dan Al-Darami)³⁰

Ditinjau dari kehujjahannya dalam pembentukan hukum Islam, maka hubungan assunnah dengan Al-qur'an adalah sebagai hubungan yang beriringan, atau sebagai urutan kedua setelah Al-qur'an, yakni sebagai rujukan para mujtahid dalam menentukan hukum jika memang tidak terdapat dalam Al-qur'an. Sehingga Al-qur'an merupakan sumber hukum pokok dan yang pertama bagi pembentukan hukum Islam. Oleh sebab itu, jika di dalam Al-qur'an tidak di jumpai, maka harus kembali kepada sunnah. Dan apabila di dalam sunnah terdapat atau di jumpai hukum yang pasti, maka assunnah di ikuti.³¹

c) Ijma'

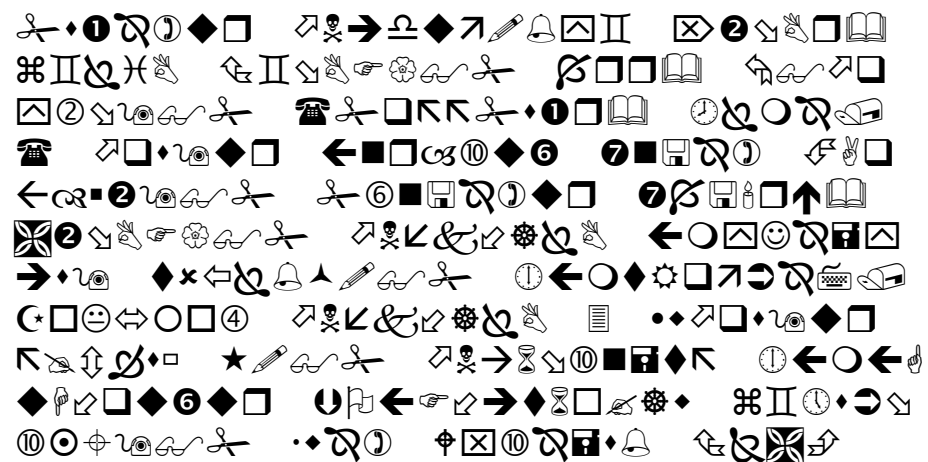
³⁰ Nawir Muslim. *Ulumul Hadis* (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1998) h 39

³¹ *Ibit.* H. 41

Ijma' ialah kesepakatan para imam mujtahid diantara umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat, terhadap hukum syara' tentang suatu masalah atau kejadian.³²

Maka dari itu, jika terdapat suatu kejadian yang dihadapkan kepada seluruh mujtahid pada waktu itu, maka kesepakatan mereka disebut hukum ijma' di anggap sebagai sumber hukum tentang persoalan tersebut. Dari definisi di atas hanya di katakan setelah Rasulullah SAW wafat, karena ketika Rasulullah masih hidup, hanya beliaulah tempat bertanya dan kembalinya syari'ah Islam.

Bukti ke hujjahan ijma' adalah firman Allah SWT;



Artinya: *Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri, di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengingat syaitan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu). QS. An-Nisa':83)*³³

³² Abdul Wahab Khallaf, *Op.cit.* h. 49

³³ Departemen Agama, *Op.cit.* h. 83

3) Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam

a) Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan suatu langkah *inovatif* dalam ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Dengan demikian, sistem bagi hasil dapat dipandang sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara si kaya dan si miskin di dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara teknis, konsep bagi hasil terselenggara melalui mekanisme penyertaan modal atas dasar *profit and loss sharing*, *profit sharing* atau *revenue sharing* dari suatu proyek usaha, dengan demikian pemilik modal merupakan partner usaha, bukan sebagai yang meminjamkan modal. Hal ini terwujud dalam bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pihak kedua dalam melakukan unit-unit usaha atau kegiatan ekonomi dengan landasan saling membutuhkan.

b) Macam-macam Bagi Hasil

Adapun macam-macam bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam dapat dilakukan dengan empat akad yaitu:

a. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak

Pengertian memukul atau berjalan ini adalah suatu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁴⁰

Mudharabah adalah suatu akad kerja sama usaha antara dua belah pihak di mana pihak pertama (*shahibu al maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola.

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola.⁴¹ Begitu juga dalam hal *mudharabah* pertanian, pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada seseorang untuk dikelola dengan imbalan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Mudharabah sendiri dibagi kepada dua yaitu: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibu al maal* dengan *mudharib* yang cakupannya cukup luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu daerah usaha. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* yang mana *mudharib* dibatasi oleh jenis usaha, waktu atau tempat usaha

⁴⁰ *Ibid.* h.149

⁴¹ Muhammad, *Etika dan Starategi Bisnis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008), h. 244

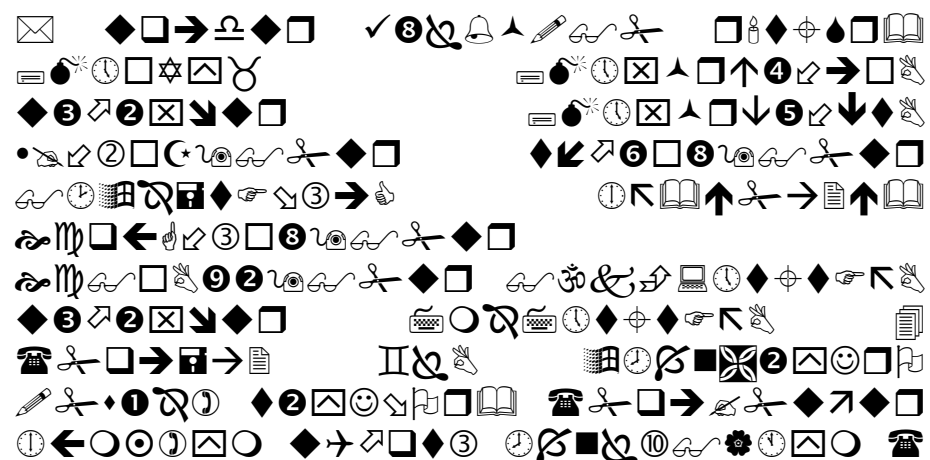
oleh shahibu al maal, pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan si shahibu al maal dalam memasuki dunia usaha.⁴²

Rukun Mudharabah

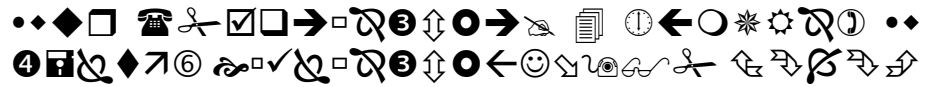
- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
- c. Aqad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
- d. Mal, yaitu harta pokok atau modal
- e. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba atau untung

c. *Muzara'ah*

Muzara'ah berasal dari kata zara'a yang berarti menyemai, menanam, menaburkan benih. Surat yang berkaitan erat dengan akar kata tersebut adalah surat Al-An'aam ayat 141:



⁴² Muhammad. *Op.cit*, h. 245



Artinya: *Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak sama. Makanlah dari buahnya bila dia berbuah dan tunaikan haknya di hari memetik hasilnya dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Seungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*(Qs Al-An'aam 41)⁴³

Sehingga muzara'ah diartikan dengan kerjasama pengelolaan antara pemilik lahan dengan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.⁴⁴

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كان له ارض فليزرعها, اوليمفهما احاه, فان الى فليمسك ارضه)

Dari Abi Hurairah Radhiyallahu berkata: Berkata Rasulullah Saw: Barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya

⁴³ Departemen Agama. *Op.cit.* h. 91

⁴⁴ Muhammad. *Op.cit.* h. 245

atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu.”(R. H. Bukhori)⁴⁵

Rukun Muzara’ah

- a. Syarat yang bertalian dengan ‘aqidain, yaitu harus berakal
- b. Hal yang bertalian dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu;
 - a) bagian masing-masing harus disebutkan persentasenya ketika akad
 - b) hasil adalah milik bersama,
 - c) bagian antara Amil dan milik adalah dari satu jenis barang yang sama, misalnya dari kapas, bila malik bagiannya padi kemudian Amil bagiannya singgong, maka hal ini tidak sah,
 - d) bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui).
- c. Hal yang bertalian dengan waktu, syaratnya ialah waktunya ditentukan.

d. *Musaqah*

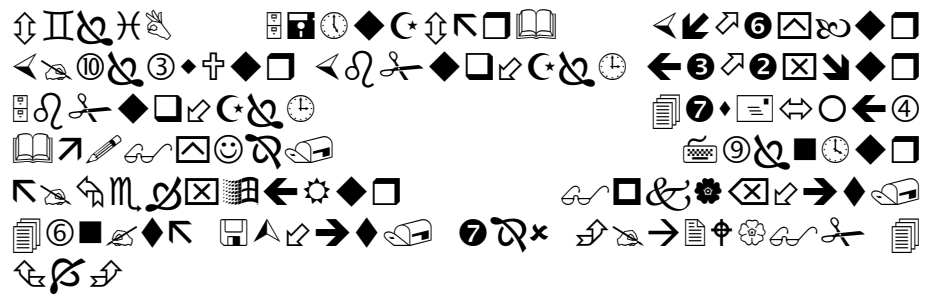
Secara sederhana *musaqah* dapat diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman tua dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut, yang dimaksud dengan tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya, atau yang berair untuk mengharapkan airnya.⁴⁶

Allah SWT berfirman;



⁴⁵ Muhammad Nashruddin, Al-Bani *Op.Cit.*,h. 683

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003) h. 243



Artinya: *Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang disirami dengan air yang sama.*(QS. Ar Ra'd: 4).⁴⁷

عن ابن عمر رضي الله عنهما: ان رسول الله صلى
الله عليه وسلم عا مل اهل خيبر بشطر ما يخرج منه
من ثمر او زرع) متفق عليه وفي رواية لهما: فسالوا
ان يقرهم بها علي ان يكفوا عملها ولهم نصف التمر
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (نقركم بها
على ذلك ما سئنا فقروا بها حتيا اجلاهم عمر ولمسلم:
(ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الى يهود خيبر
نخل خيبر وارضها على ان يعتنلوها من اموالهم وله
(شطر ثمرها)

⁴⁷ Departemen Agama, *Op.cit.*, h. 199.

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah-buahan dan tanaman. Muttafaq Alaihi. Dalam suatu riwayat Bukhari-Muslim: Mereka meminta beliau menetapkan mereka mengerjakan tanah (Khaibar) dengan memperoleh setengah dari hasil kurma, maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Kami tetapkan kalian dengan ketentuan seperti itu selama kami menghendaki." Lalu mereka mengakui dengan ketetapan itu samapi Umar mengusir mereka. Menurut riwayat Muslim: Bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memberikan pohon kurma dan tanah Khaibar kepada kaum Yahudi di Khaibar dengan perjanjian mereka mengerjakan dengan modal mereka dan bagi mereka setengah dari hasil buahnya.⁴⁸

Ulama malikiyah menyatakan sebagaimana yang dikutip dari bukunya Nasroen Harun bahwa yang menjadi objek musaqah itu adalah tanaman keras dan palawija, seperti kurma, apel dan anggur. Dengan syarat: (a) akad musaqah di lakukan sebelum buahnya itu layak panen, (b) tenggang waktu yang ditentukan jelas, (c) akad yang dilakukan setelah tanaman itu tumbuh, (d) pemilik kebun tersebut tidak mampu mengelola dan mengurusnya.⁴⁹

Rukun Musaqah

- a. Shigat dilakukan dengan jelas
- b. Dua orang atau pihak yang berakad, disyaratkan bagi orang yang mampu untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal.
- c. Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparohkan(bagi hasil)

⁴⁸ Alkahlani, Muhammad, Ibn Ismail, *Op. cit.*, h.78.

⁴⁹ Muhammad Nashiruddin Al- abani, *Ringkasan Shaih Muslim*, (Jakarta: Pustak Azzam, 2003), h. 683

- d. Masa kerja, hendaknya ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan.
- e. Buah atau hasil hendaklah ditentukan bagian masing-masing(yang punya kebun dan pekerja di kebun) seperti sepertiga, seperdua, seper empat, atau ukuran lainnya.

c) Bagi Hasil Pertanian Dalam Ekonomi Islam

Dalam Islam, tanah adalah merupakan milik bersama demi pemanfaatan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, oleh karena itu pemilik dan perusahaan atas tanah yang membatasi keuntungan segelintir orang dan yang mengesampingkan sebagian besar masyarakat adalah bertentangan dengan jiwa Al-qur'an. Di dalam ekonomi Islam tidak seorang pun yang bisa menuntut pemilik tanah secara mutlak, karena tanah itu secara mutlak adalah milik Allah SWT.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tanah tidak boleh dilerantarkan, jika tidak sanggup menggarapnya sendiri maka serahkan kepada orang lain untuk digarap, oleh sebab itu nantinya akan terjalin kerjasama antara dua belah pihak dalam penggarapan sebidang tanah dan hasil panennya dibagi sesuai dengan kesepakatan dan mekanisme pengelolaannya.

Al San'ani mempunyai pendapat yang sama dengan Afzalur Rahaman mengenai *muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah penggarapan

lahan dengan mendapatkan bagian dari penggarap dengan ketentuan benih/bibit dari pemilik kebun/lahan, dan apabila bibitnya dari penggarap maka disebut mukhabarah.⁵⁰

Menurut imam Syafi'I yang dikutip dari bukunya Nasroen Haroen mendefenisikan mukhabarah" pengolah tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan oleh penggarap", sehingga dalam mukhabarah bibit yang ditanam di sediakan oleh penggarap tanah, sedangkan dalam muzara'ah bibit yang akan ditanam disediakan oleh pemilik tanah.⁵¹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa muzara'ah adalah kerjasama dalam pengelolaan tanah yang bibitnya disediakan oleh pemilik tanah/lahan dan mukhabarah adalah si penggarap hanya bertugas untuk memelihara, menjaga dan menyirami lahan pertanian saja.

Walaupun demikian, ada bentuk-bentuk yang dilarang dalam pengelolaan tanah dalam ekonomi Islam, berikut akan dijelaskan bentuk-bentuk apa saja yang terlarang dan yang boleh oleh para ahli fiqih:

Bentuk-bentuk bagi hasil yang terlarang adalah:⁵²

1. Suatu bentuk perjanjian yang ditetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik lahan

⁵⁰ Al San'ani, Subul Al- Salam, (Bandung: Dahlan) h. 77

⁵¹ Nasroen Haroen, *Op.cit.* h. 276

⁵² Afzalur Rahman, *Op.cit.* h. 213-215

2. Ditetapkan jumlah tertentu dari hasil panen yang harus diserahkan kepada satu pihak selain dari bagian yang sudah ditetapkan
3. Adanya hasil panen lain (selain dari pada yang ditanam di lahan atau di kebun) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.

Adapun bentuk bagi hasil yang sah adalah:⁵³

1. Perjanjian kerjasama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik lahan akan memperoleh bagian tertentu dari hasil panen.
2. Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya dibebankan kepada pemilik lahan sedangkan hanya buruh yang dibebankan kepada petani maka harus ditetapkan pemilik lahan akan memperoleh bagian tertentu dari hasil panen
3. Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil panen.
4. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, pekerja dan alat pertanian dari petani sehingga menjadi objek muzara'ah adalah jasa petani.

⁵³ Nasroen Haroen, *Op.cit.* h. 279

5. Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak menanggung benih, buruh dan pembiayaan pengolahannya, dalam hal ini keduanya akan mendapat dari hasil panen.

BAB IV

**PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK BAGI
HASIL AREN DI KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

A. Sistem Bagi Hasil aren di Kecamatan Puncak Sorik Marapi

Manusia dianjurkan untuk menggunakan kemampuan ataupun potensi yang ada di dalam dirinya, akan tetapi tidak bisa terlepas dari sumber daya alam yang tersedia dimana tempat ia tinggal. Dengan demikian, masyarakat Kecamatan Puncak Sorik Marapi telah melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kemampuan dan potensi serta sumber daya alam yang tersedia yaitu pertanian, dalam hal ini masyarakat Kecamatan Puncak Sorik Marapi mengembangkan perkebunan aren sebagai sumber perekonomian mereka.

Walaupun sebenarnya tidak semua masyarakat yang mempunyai kebun aren, akan tetapi mereka mempunyai kemampuan untuk menggarapnya dan ada pula yang mempunyai kebun aren akan tetapi tidak mempunyai kemampuan dan bahkan tidak mempunyai waktu untuk menggarapnya. Untuk menghindari agar jangan terjadinya ketelantaran kebun dan lahan, maka mereka melakukan akad kerja sama untuk memanfaatkan kebun aren tersebut.

Dari wawancara yang penulis lakukan ada dua kategori terhadap kebun aren ini. Pertama, menyadap aren sebagai gaya hidup, kedua; menjadikan

kebun aren sebagai landasan dan sumber kehidupan utama keluarga. Sehingga di dalamnya terdapat aspek kesejahteraan, yang mana semakin banyak kebun arennya semakin tinggi pula tingkat kehidupan sosialnya di masyarakat.⁵⁵

Dalam mengelola lahan pertanian antar satu daerah dengan daerah lainnya tentu berbeda, karena dalam pengelolaannya tentu disesuaikan dengan keadaan tanah dan kebutuhan yang dikehendaki oleh manusia itu sendiri, begitu juga halnya dengan pengelolaan dan akad kerjasama yang terdapat di Kecamatan Puncak Sorik Marapi.

Dalam sistem perkebunan aren di Kecamatan Puncak Sorik Marapi sedikit berbeda dengan sistem pertaniannya seperti ladang dan sawah, karena dalam sistem ini lahannya sudah siap digarap tidak seperti ladang atau sawah yang dimulai dari pembibitan terlebih dahulu.

Untuk pembahasan dalam bagian ini penulis akan menyampaikan sistem bagi hasil aren masyarakat Kecamatan Puncak Sorik Marapi dengan maksud untuk mengetahui lebih jelas bagaimana masyarakat menggunakan sistem bagi hasil pertanian dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Berikut adalah bentuk-bentuk sistem bagi hasil aren yang dipakai oleh masyarakat Desa Kecamatan Puncak Sorik Marapi;

⁵⁵ Sayuti (Kepala Desa Sibanggor Julu), *Wawancara* 14 Mei 2010.

1. Sistem Sewa

Yang dimaksud dengan sistem sewa adalah sistem yang dilakukan oleh pemilik kebun dan petani penggarap dalam penyewaan kebun secara tunai. Pemilik kebun menyewakan kepada petani penggarap, penggarap memberikan sejumlah uang secara tunai yang telah ditentukan oleh pemilik kebun sebagai pengganti dari hasil kebunnya. Dengan demikian petani penyewa telah mempunyai hak menggarap kebun aren tersebut.

Dalam sistem ini semua peralatan, pupuk dan obat-obatan ditanggung oleh petani, penyewa begitu juga dari hasil pertaniannya semua menjadi milik petani. Pemilik kebun dalam hal ini tidak mendapat apa-apa kecuali uang dari hasil sewa kebun aren tersebut.

Dalam sistem ini pemilik kebun menentukan jumlah uangnya yang harus di bayarkan oleh petani penyewa dan menentukan lamanya penyewaan.

Ketentuan jumlah uang yang harus dibayarkan disesuaikan dengan kondisi aren dan harga aren, apakah harga aren unggul atau turun pada saat itu, dan tergantung luas kebun aren dan berapa batang jumlah pohon aren dalam kebun tersebut. Seperti seperempat hektar terdiri dari 100 batang pohon aren, dimana si pekerja memberikan uang sebanyak Rp 2.000.000,- sebagai pengganti dari kebun aren tersebut. Rentang waktu biasanya ditetapkan persemester atau per-6 bulan dan ada juga pertahunnya, apabila masa sewa telah berakhir maka petani penyewa harus mengembalikan kebun tersebut

kepada pemilik kebun dan juga jika ia berkeinginan untuk tetap menyewanya kembali maka harus melakukan akad sewa kembali.⁵⁶

Akad sewa ini terjadi biasanya pemilik kebun bertempat tinggal di daerah lain dan ada juga karena tidak sempat mengurusnya dengan alasan dia mempunyai pekerjaan lain seperti guru dan pegawai Negeri sipil. Sebagaimana yang dilakukan oleh Apis, dia menyewakan kebun aren ke Dani untuk bisa ia garap kemudian Dani membayar sejumlah uang yang akan di bayarka ke Apis sebagai pengganti dari hasil kebun tersebut. Akad sewa yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Puncak Sorik Marapi ini sudah atau sesuai dengan syari'at Islam.⁵⁷

2. Sistem *Bagi Dua* (Paroan)

Yang dimaksud dengan sistem *bagi dua* adalah dimana orang yang mempunyai kebun menyerahkan kebunnya kepada petani untuk dikelola. Adapun pembagian dari hasil pertanian sesuai dengan kesepakatan mereka antara pemilik dengan petani.

Dalam sistem ini biasanya semua peralatan ditanggung oleh petani atau pengelola sedangkan yang berkaitan dengan kebun seperti pupuk, obat-obatan ditanggung oleh pemilik kebun.

Sehingga dalam bagi hasil aren biasanya mereka bagi dua saja, seperti dalam sepekan (seminggu) misalnya dapat 100 kg aren, maka punya kebun/lahan mendapatkan 50 kg dan petani penggarap pun mendapatkan 50 kg

⁵⁶ Abdul yasir(Tokoh Masyarakat Puncak Sorik Marapi) *Wawancara* 12 Oktober 2010

⁵⁷ Ahmad yani(Tokoh Masyarakat Desa Sibanggor Tonga) *Wawancara* 12 Oktober 2010

tapi ada juga melakukan dengan perbandingan 60:40/per bagian masing-masing.

Sebagaimana yang di rasakan oleh Majid sebagai pengelola kebun Khoir, dimana Khoir membagi hasil aren kepada Majid dengan menggunakan sistem 50 untuk pemilik(Khoir) dan 50 untuk pengelola(Majid) dengan hasil yang di dapat per minggunya sebanyak 75 kg.⁵⁸. Tetapi ada juga yang melakukan dengan perbandingan 60: per bagian masing-masing, sebagaimana yang di rasakan oleh Asrul sebagai pekerja dengan pendapatan per minggunya sebanyak 90 kg sebagai pemiliknya Aswar dimana pemilik kebun membagi hasil aren tersebut dengan 60 untuk yang punya lahan dan 40 untuk pekerjanya.⁵⁹

Namun jika selama penggarapan berjalan, tiba-tiba petani penggarap sakit atau ditimpa musibah, maka biasanya yang punya kebun menyuruh kerabat si penggarap untuk menyadap aren dan hasilnya pun tetap dibagi separuh untuk yang punya kebun dan separoh lagi tergantung pada dua orang penggarap tersebut. Dan jika terjadi bencana alam seperti banjir atau kebakaran, maka petani tidak ada menanggung kerugian selama bencana itu terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian petani penggarap.

⁵⁸ Khoir (Pemilk kebun aren) *Wawancara* 15 Oktober 2010

⁵⁹ Aswar (Pekerja kebun *Wawancara* aren) 15 Oktober 2010

3. Sistem Bagian Batang

Adapun yang dimaksud dengan bagian batang ini adalah akadnya hampir sama dengan sistem bagi dua (paroan). Dalam bagi hasil batang ini ada pemilik kebun atau lahan yang memotong dari hasil panen 10 kg dan ada juga yang memotong 5 kg dari hasil panen, kemudian baru di bagi hasil panen tersebut. Sehingga dalam bagi hasil aren mereka biasanya membagi hasil panen sesudah di potong, seperti dalam sepekan atau (seminggu) misalnya dapat 100 kg , maka yang punya kebun memotongnya 5 kg kemudian 95 kg di bagi dua. Dan ada juga yang pemilik kebun yang memotong dari hasil panen 10 kg seperti, dalam sepekan atau (seminggu) pendapatannya 120 kg, maka pemilik kebun memotong dari hasil kebunnya 10 kg dari 120 kg maka yang 110 kg di bagi dua antara si pemilik dengan si penggarap.

Misalnya Musa sebagai pengelola kebun aren dimana Musa mendapatkan hasil aren dari lahan Manap dalam seminggunya sebanyak 135 kg, dimana si pemilik kebun memotong dari hasil aren sebanyak 5 kg dari 135 kg kemudian dibagi dua yang mana si pemilik mendapat 65 kg dan pekerja mendapat 65 kg juga.⁶⁰

Ada juga yang menggunakan sistem bagian batang ini dengan memotong hasil aren yang di dapatkan 10 kg. Sebagaimana yang di lakukan oleh Manan sebagai pemilik kebun aren dimana setiap pembagian hasil Manan memotong 10 kg dari hasil aren Aris (pekerja) dimana per tiga harinya

⁶⁰ Manap (Pemilik kebun aren) *Wawancara* 16 Oktober 2010

si pekerja mendapat hasil kebun aren sebanyak 60 kg kemudian si pemilik memotong 10 kg kemudian baru dibagi dua dari 50 kg nya. Dimana si pekerja mendapat 25 kg dan si pemilik mendapat 25 kg.⁶¹ Sedangkan dari keinginan pekerja ingin memakai sistem 5 kg dari 100 kg.

4. Sistem Tolong Menolong

Dalam sistem ini pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada petani penggarap, namun tidak ditentukan bagi hasilnya. Petani penggarap boleh menyerahkan hasil kebun itu dalam sepekan berapa saja, karena dalam sistem ini sifatnya hanya tolong menolong dan membantu sesama manusia.

Sistem ini terjadi biasanya pemilik kebun merasa kasihan melihat kondisi ekonomi petani penggarap sangat lemah/rendah sehingga pemilik menyerahkan kebunnya untuk digarap dan juga biasanya terjadi karena pemilik kebun bertempat tinggal jauh dari lokasi kebunnya atau di daerah lainnya seperti Sidimpuan, Medan dan tidak jarang di antara mereka alasannya karena tidak mempunyai kesempatan untuk menggarapnya karena mempunyai pekerjaan lain seperti Guru, Pegawai Negeri Sipil dan sebagainya.

Misalnya Asnam sebagai pemilik kebun Asnam menyerahkan kebunnya kepada Mukhtar untuk di kelola dan dirawat agar jangan sampai kebun tersebut terlantar, Karena pemilik kebun tidak sempat mengurusnya pun pemiliknya tidak bertempat tinggal di desa Puncak Sorik Marapi.⁶²

⁶¹ Aris (Pemilik kebun) *Wawancara* 20 Oktober 2010

⁶² Mukhtar (Pekerja kebun aren) *Wawancara* 20 Oktober 2010

Perlu dijelaskan bahwa pada sistem tolong-menolong ini agak berbeda dengan ketiga sistem sebelumnya, pada sistem ini dilatarbelakangi semata-mata hanya untuk menolong petani penggarap, tidak seperti ketiga sistem sebelumnya yang merupakan suatu tujuan meningkatkan taraf kehidupan atas hasil yang didapat.

5. Sistem Bagi Tiga

Yang dimaksud dengan sistem bagi tiga adalah dimana orang yang mempunyai kebun menyerahkan kebunnya kepada petani untuk dikelola. Adapun pembagiannya dibagi tiga yang dua bagiannya untuk yang punya kebun, misalnya dalam sepekan menghasilkan 120 kg aren, dibagi tiga menjadi 40 kg, yang mana 40 kg untuk punya kebun dan sisanya untuk petani.⁶³

Seperti halnya sistem tolong-menolong, sistem bagi tiga ini pun didasari atas rasa solidaritas sesama manusia dan saling tolong-menolong akan sesama saudara. Sistem ini juga terjadi biasanya karena pemilik kebun bertempat tinggal jauh dari lokasi kebun tersebut.

B. Tinjauan Sistem Bagi Hasil Aren di Kecamatan Puncak Sorik Marapi Menurut Ekonomi Islam

Sistem bagi hasil aren yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Puncak Sorik Marapi secara garis besar sudah merujuk kepada ajaran fiqhi, hal ini disebabkan oleh masyarakat Kecamatan Puncak Sorik Marapi yang dalam kehidupannya dipengaruhi oleh kehidupan beragama dan juga terlihat

⁶³ Kholil(Pemilik kebun) *Wawancara* 22 Oktober, 2010

dari mereka para orangtua di Kecamatan Puncak Sorik Marapi ini menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah yang bernuansa agama.

Akan tetapi secara teori, mereka kurang mengetahui mengenai sistem atau pola bagi hasil aren yang mereka terapkan sehari-hari, apakah sudah sesuai dengan konsep bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam atau tidak.⁶⁴

Pada pembahasan sebelumnya penulis telah mengungkapkan bentuk-bentuk bagi hasil dalam ekonomi Islam secara teori serta pendapat para ahli ekonomi Islam tentang bagi hasil pertanian. Penulis juga telah menjelaskan bentuk-bentuk bagi hasil dalam pertanian yang sah dan yang tidak sah. Sementara tentang bagaimana sistem bagi hasil aren di Kecamatan Puncak Sorik Marapi pun sudah dijelaskan secara rinci.

Adapun bentuk-bentuk bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam disebut muzara'ah dan musaqah, untuk itu pada pembahasan mengenai analisa ini penulis memfokuskan pada muzara'ahnya.

Untuk mengetahui sistem bagi hasil aren di Kecamatan Puncak Sorik Marapi menurut ekonomi Islam penulis akan memilah dari bentuk sistem yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Puncak Sorik Marapi.

Ada lima bentuk sistem bagi hasil aren yang diterapkan oleh masyarakat Kecamatan Puncak Sorik Marapi antara lain: (1) Sistem Sewa, (2) Sistem bagi dua/Paroan, (3) Sistem bagian batang, (4) Sistem tolong-menolong, (5) Sistem bagi tiga.

⁶⁴ Muhammad Daut, (Tokoh Masyarakat Sibanggor jae) *Wawancara*, 23 oktober 2010

Dari lima sistem tersebut sebenarnya sistem sewa tidak termasuk dalam pembahasan ini, karena tidak terdapat pola bagi hasil di dalamnya. akan tetapi penulis mencoba sedikit menjelaskan apakah sistem ini sesuai atau boleh dilakukan dalam pertanian. Sebab sistem ini dipakai oleh masyarakat khususnya masyarakat di Kecamatan Puncak Sorik Marapi.

Muhammad Safi'i Antonio dalam bukunya "Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan" menjelaskan bahwa ijarah (sewa) adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.⁶⁵

Dari penjelasan ini dapat diambil kesimpulan bahwa akad sewa terjadi dalam pertanian aren di Kecamatan Puncak Sorik Marapi sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam, karena hanya bersifat pemindahan hak atas pengelolaannya bukan pemindahan hak atas kepemilikan. Jadi disini sudah terlihat relevansinya menurut ekonomi Islam sebab si pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada si pengelola lahan kemudian si pengelola memberikan uang kepada pemilik lahan secara tunai maka si pengelola sudah mempunyai hak untuk mengelolanya.

Sedangkan keempat sistem lainnya yaitu sistem *bagi dua*, *bagian batang*, *tolong-menolong*, dan sistem bagi tiga sudah terlihat relevansinya dengan muzara'ah karena didalamnya terdapat bagi hasil sebagaimana terdapat dalam hadist:

⁶⁵ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Instut, 1999), h. 181.

عن صهيب رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ثلاث فيهن البركة: البيع الى اجل والمقارضة وخطب بالشعير للبيت لما للبيع) رواه ابن ماجه باسناد ضعيف

Dari Shuhaib Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tiga hal yang didalamnya ada berkah adalah jual-beli bertempo, ber-qirad (memberikan modal kepada seseorang hasil dibagi dua), dan mencampur gandum dengan sya'ir untuk makanan di rumah, bukan untuk dijual." Riwayat Ibnu Majah dengan sanad lemah.⁶⁶

Akan tetapi perlu di kaji yang lebih mendalam lagi dari keempat sistem tersebut apakah benar-benar sudah sesuai menurut ekonomi Islam, untuk itu penulis akan menelaah satu persatu.

Sistem bagi dua yang terdapat di Desa Kecamatan Puncak Sorik Marapi sudah sesuai dengan akad bagi hasil pertanian dalam Islam atau muzara'ah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad bin Hasan Aisyaibani, yang dikutip dari bukunya Nasrun Harun mengenai bentuk-bentuk muzara'ah yang dianggap sah yaitu jika pemilik lahan menyediakan lahan sedangkan petani menyediakan alat pertanian dan tenaga kerja sehingga yang menjadi objek muzara'ahnya adalah pemanfaatan lahan.⁶⁷

⁶⁶ Alkahlani, Muhammad Ibn Ismail, *Op. cit.*, h.76.

⁶⁷ Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Griya Media Pratama, 2000), h. 279.

Begitu juga halnya dengan sistem bagi dua yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Puncak Sorik Marapi, yang mana pemilik kebun hanya menyediakan lahannya saja sedangkan mengenai alat pertaniannya disediakan oleh petani, kemudian hasilnya nanti akan dibagi dua sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh kedua belah pihak. Sistem bagi dua yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Puncak Sorik Marapi juga sudah sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yaitu bibit yang disediakan oleh pemilik lahan. Begitu juga halnya di Kecamatan Puncak Sorik Marapi yang mana bibit disediakan pemilik kebun sehingga petani penggarap hanya tinggal menggarapnya saja.

Adapun mengenai hal-hal yang mungkin terjadi selama penggarapan berlangsung seperti banjir atau kebakaran yang mana tidak terdapat ganti rugi, hal tersebut tidaklah membatalkan akad muzara'ah yang sah. Sebab dalam sistem bagi dua (paroan) ini kedua pihak bersama-sama menanggung biaya, sehingga keduanya mendapat bagian dari hasil kebun begitu juga kerugiannya.

Sedangkan dalam sistem bagian batang yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Puncak Sorik Marapi, yang mana terdapat bagian tertentu yang didapat oleh pemilik lahan dari hasil kebun, untuk itu sesuai tidaknya sistem ini dalam pandangan ekonomi Islam perlu dilihat sebab pemotongan tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai bagi hasil perkebunan yang sah dan tidak sah menurut ekonomi islam yaitu apabila bagian yang didapat dari pemotongan karena disebabkan

biaya pemotongan itu dilakukan di luar biaya pembibitan dan obat-obatan maka hal tersebut dipandang tidak sah.

Mengetahui hal tersebut penulis melihat bahwa sah tidaknya sistem bagian batang ini menurut ekonomi Islam dilihat dari akad yang dilakukan, dan juga pemotongan hasil aren tersebut, kalau pemotongan itu terjadi karena biaya pembibitan hanya berupa bagian yang wajib didapat oleh pemilik lahan karena mereka berpikiran kalau tidak karena lahannya maka petani tidak akan menghasilkan apa-apa, maka bagi hasil tersebut tidak sesuai dengan ekonomi Islam dan akad yang dilakukan pun tidak sah.

Namun kebanyakan para pemilik lahan/kebun yang ada di Kecamatan Puncak sorik Marapi beralasan bagian yang mereka dapatkan dari bagian batang ini adalah potongan dari biaya pembibitan yang mereka lakukan dari penanaman sampai siap digarap, maka sistem bagian batang yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Puncak Sorik Marapi sudah terlihat relevan dengan konsep ekonomi Islam.

Adapun sistem tolong menolong yang mana tujuan dasarnya adalah rasa kasihan dan saling membantu, maka sangat jelas kesesuaiannya dengan konsep ekonomi Islam, karena dalam Islam sendiri sangat dianjurkan untuk saling tolong menolong antara sesama manusia dan bahkan tidak boleh membiarkan tetangganya atau saudaranya kelaparan sedangkan kita berkecukupan, sebagaimana yang terlampir dalam al-qur'an;

Artinya: *Dan tolong menolonglah kamu (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*(QS. AL-Ma'idah:2)⁶⁸

Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa dalam Islam apabila seseorang memiliki kelebihan harta baik itu sedikit atau banyak, maka ia tidak boleh sewenang-wenang dan membiarkan saudaranya terlantar. Karena dalam kepemilikan dan penggunaan harta, tidak semata untuk kepentingan pribadi, namun juga harus bisa memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk orang lain.

Dalam sistem tolong menolong yang di lakukan oleh masyarakat Kecamatan Puncak sorik Marapi ini tergolong ke sistem musaqah yang mana pada musaqah pihak kedua diberi kepercayaan untuk menjaga kebun dan mendapatkan bagian dari hasil kebun tersebut, begitu juga pada sistem tolong menolong, petani penggarap diberi kepercayaan oleh yang punya kebun menjaga kebunnya dan dia mendapatkan hasil dari hasil kebun tersebut.

Sedangkan yang terakhir yaitu sistem bagi tiga yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Puncak Sorik Marapi, dimana pemilik kebun mendapatkan 1/3 dari hasil kebun, pada sistem ini juga terdapat unsur ta'awunnya.

Dari kelima sistem bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Puncak Sorik Marapi tersebut sudah terlihat menurut

⁶⁸ Departemen Agama, *Op. cit.* h. 85

ekonomi Islam. Kecuali sistem bagian batang yang mana harus dilihat dulu tujuan dari pemotongan hasil dan akad yang dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada lima bentuk sistem bagi hasil aren yang diterapkan oleh masyarakat Puncak Sorik Marapi yaitu: (1) sistem sewa (2) sistem bagi dua (3) sistem bagian batang (4) sistem tolong menolong (5) sistem bagi tiga.
2. Dari kelima sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Puncak Sorik Marapi sudah terlihat kesesuaiannya menurut tinjauan Ekonomi Islam. Tetapi sistem sewa tidak termasuk dalam katagori bagi hasil, tetapi boleh dilakukan karena sifatnya hanya pemindahan pengelolaan bukan pemindahan hak milik. Sedangkan dari keempat sistem lainnya yaitu sistem bagi dua, bagian batang, tolong-menolong, dan sistem bagi tiga sudah sesuai menurut tinjauan ekonomi Islam yang tergolong kepada muzara'ah dan musaqah, kecuali pada sistem bagian batang yang mana harus dilihat dulu dari tujuan dan sebab pemotongan dari hasil serta akad yang dilakukan.

B. Saran-saran

1. Karena sistem perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat Puncak Sorik Marapi sesuai dengan ekonomi Islam untuk itu perlu dipertahankan dari generasi ke generasi.
2. Karena kebanyakan masyarakat belum mengetahui bahwa sebenarnya sistem perkebunan yang mereka lakukan sudah sesuai dengan ekonomi Islam untuk itu kepada para ekonomi Islam perlu memperkenalkan secara mendalam tentang bagi hasil perkebunan dalam ekonomi Islam dan mensosialisasikannya kepada masyarakat.
3. Kepada Dinas pertanian Kabupaten Mandailing Natal untuk lebih aktif lagi dalam mengembangkan kebun aren ini, sehingga aren benar-benar menjadi andalan pendapatan masyarakat Puncak Sorik Marapi.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktek Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Insitut,1999)

Arifin Zainul, *Memahami Bank Syari'ah, Lingkup Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alvabet,2000)

Balda Syamsul, *Menuju Sistem Ekonomi Qur'ani*, (Jakarta: Pustaka Tarbiatuna,2001)

Dawwabah Asyraf Muhammad, *Meneladani Keuangan Bisnis Rasulullah*, (Semarang: Pustaka Riski Putra,2006)

Haron Nasron, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Gramedia Pratama,2000)

Hamidi Muhammad Luthfi, *Jejak-jejak Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Gramedia,2003)

H. Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: CV Sinar Baru,1998)

Ibnu Ismail Al-Kahlani, *Subulu, Assalam*, (Bandung: Dahlan,1926)

Mujahidin Akhmad, *Ekonoomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007)

Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah, Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjajian Pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press,2009)

Qardawi Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Perss,1997)

Rustam Bambang Rianto, *Perbankan Syari'ah*, (Pekanbaru: Mumtaz Cendikiawan Press,2004)

Syaefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Prespektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: CV. Rajawali Perss,1987)

Sukimin Sadono, *Pengantar Teori Ekonomi Makro* (Jakarta: PT. Raja Grafindo,1998)

Suhendi Hendi. *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2007)

Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fiqhi*, (Jakarta: Prenada Media,2003)

Sholihin Akhmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: PT. Garmedia Pustaka Kompas,2010)

Tanjung Hendri, *Manajemen Syari'ah dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani,2003)

Triwono Iwan, s, (Jakarta: Alvabet,2002)

Taufiq Ali Muhammad, *Praktek Manajemen Berbasis Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani,2004)

Yuslem Nawir, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001)

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Puncak Sorik Marapi Menurut Jenis Kelamin	12
Tabel II.2	Jumlah Penduduk Menurut Ketentuan Usia	13
Tabel II.3	Personalia Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.....	14
Tabel II.4	Sarana dan Pra Sarana Pendidikan.....	16
Tabel II.5	Mata Pencarian Masyarakat Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal	18